



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
Pos-el dkp3a@kaltimprov.go.id Laman <https://dkp3a.kaltimprov.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Rudy Mas'ud
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, April 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Gubernur Kalimantan Timur

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Rudi Mas'ud

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dra. Sri Wahyuni, M.PP	Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim	
2	H.M. Syirajudin, SH, MT	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Provinsi Kaltim	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	71,00
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	2
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	300
3	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	23,23
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	80
5	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.63
6	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 23.539.821.438	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.527.238.943	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 2.196.794.343	APBD
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 791.605.694	APBD
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 809.647.043	APBD
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.830.270.034	APBD
7.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 468.344.973	APBD
8.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 560.395.965	APBD
9.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 325.667.874	APBD
10.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 350.428.169	APBD
11.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 315.116.725	APBD
12.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 669.542.492	APBD

Samarinda, April 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Gubernur Kalimantan Timur

Kepala DKP3A Prov. Kaltim

Rudy Mas'ud

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT